

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Irwan Ghazali

Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: irwan1800031154@webmail.uad.ac.id

Zakki Teguh Wibawa

Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: zakki1800031153@webmail.uad.ac.id

Muhammad Lutfi Nur Fauzi

Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: muhammad1900031145@webmail.uad.ac.id

Syifa Nur Anggraini

Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: syifa1900031211@webmail.uad.ac.id

ABSTRAK

Analisis kebijakan merupakan sebuah metode pemecahan permasalahan publik yang dalam penyelesaiannya menggunakan argumen-argumentasi fakta untuk menjabarkan, menjelaskan, menghasilkan pemikiran baru serta menilai permasalahan tersebut. Analisis kebijakan dalam penerapannya biasanya menggunakan paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Selain itu Analisis kebijakan juga menggunakan dua pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan dekskriptif adalah penyajian informasi yang berdasarkan fakta dan apa adanya, sehingga para pengambil keputusan akan dengan mudah memahami permasalahan yang ada. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan argumen-argumen mereka. Dalam Prosedur Analisis kebijakan Pendidikan terdapat tiga fungsi yaitu fungsi komunikasi, inquiri, pembagian. Permasalahan yang sering muncul pada dunia pendidikan saat ini yaitu permasalahan dalam mutu Pendidikan, pemerataan akses pendidikan, persaingan Pendidikan, serta penguatan kualitas Pendidikan Indonesia.

Kata Kunci: *analisis; kebijakan; pendidikan*

ABSTRACT

Policy analysis is a method of solving public problems which in its solution uses factual arguments to describe, explain, generate new thoughts and assess these problems. In its application, policy analysis usually uses a quantitative paradigm and a qualitative paradigm. In addition, policy analysis also uses two approaches, the first is the descriptive approach, the descriptive approach is the presentation of information based on facts and what it is, so that decision makers will easily understand the existing problems. The second approach is the normative approach, the normative approach is an approach that aims to assist decision makers in providing their arguments. In the Educational Policy Analysis Procedure, there are three functions, namely the function of communication, inquiry, and division. The problems in the world of education today are problems in the quality of education, equitable access to education, education competition, and strengthening the quality of Indonesian education.

Keywords:*analysis; policy; education*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat berfungsi sebagai wadah persiapan sumber daya manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang politik, sosial budaya ketenagakerjaan, ekonomi, dan kependudukan. Hubungan Pendidikan dengan bidang-bidang lain di luar pendidikan haruslah selalau dikaji, karena dengan begitu akan munculnya keseimbangan dan kesesuaian antara system Pendidikan dengan system eksternal Pendidikan tersebut. Dengan adanya tantangan Pendidikan dari pihak eksternal tersebut memungkinkan timbulnya suatu hambatan dalam system Pendidikan, namun hal tersebut haruslah disikapi dengan baik dan dapat dijadikan pula sebagai sumber inspirasi maupun motivasi untuk melakukan perbaikan, pembaharuan, serta perubahan system pendidikan tersebut secara internal.

Dilakukannya kajian permasalahan bidang-bidang diluar Pendidikan dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan dunia Pendidikan yang selama

ini masih minim pembahasan. Sehingga para tokoh Pendidikan akan mulai memahami bahwa permasalahan yang ada pada dunia pendidikan tidak hanya menyangkut masalah internal saja melainkan juga menyangkut bagaimana Pendidikan dapat menyelaraskan dengan bidang-bidang eksternal Pendidikan yang lainnya.

Hambatan yang sangat berat dalam pembangunan Pendidikan yang bermutu yaitu meningkatkan pengolahan analisis kebijakan. Analisis dalam analisis kebijakan Pendidikan tersebut bukan hanya harus menguasai teknik pengembangan dan penelitian saja, melainkan juga harus menguasai permasalahan-permasalahan Pendidikan yang berkaitan pada masa kini, baik permasalahan internal pendidikan maupun permasalahan eksternal Pendidikan. Contoh permasalahan-permasalahan internal Pendidikan yang utama yaitu permasalahan peningkatan mutu Pendidikan, pengembangan system Pendidikan, serta pemerataan pendidikan di Indonesia.

Permasalahan diluar Pendidikan juga harusah terus dibahas, menyangkut keterikatan Pendidikan dengan peran annya di masyarakat saat ini, baik dalam bidang social budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Dengan begitu penguasaan antara unsur Pendidikan dengan unsur diluar Pendidikan haruslah selalau dibahas serta dapat juga membentuk kelompok analisis kebijakan Pendidikan dengan berlandaskan dengan kajian interdisipliner. Untuk menunjang kegiatan analisis tersebut para analis haruslah memiliki bekal dalam penguasaan perkembangan teknoligi, karena sekarang ini teknologi adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dengan begitu para analis akan merasa terbantu dengan adanya teknologi dalam melakukan pengembangan Pendidikan Indonesia. Para analis juga harus menumbuhkan rasa semangat yang ada pada dirinya, tujuannya yaitu agar analis dapat menghasilkan gagasan-gagasan menyelesaikan permasalahan dibidang Pendidikan dan meningkatkan kualitas Pendidikan Indonesia saat ini(Masdin, 2008).

B. METODE

Kajian yang dipakai dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kepustakaan atau Libary Research, metode ini merupakan kegiatan megumpulkan sumber-sumber Pustaka dan menyatukannya menjadi satu bagian. Langkah kegiatan ini yaitu membaca sumber, menghayati serta memahami pembahasan lau mencatat hasil tersebut (Sari & Asmendri, 2018).

Proses pengumpulan sumber penelitian ini biasanya menggunkan berbagai macam literatur, buku, artikel, jurnal, dokumen pribadi, majalah, dan referensi lainnya. Tahap pertama melakukan penelitian ini yaitu memilih tema yang sesuai dengan pembahasan. Kemudian mengeksplor informasi agar dapat fokus pada tujuan penelitian. Lalu mengumpulkan berbagai macam sumber data dan membaca secara mendalam dan menggali materi secara aktif dan kritis. Tahap selanjutnya yaitu mencatat, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan artikel. Kemudian mengolah serta menyusun materi yang telah didapatkan. Tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada akhir artikel (Yaniawati, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah sebuah proses atau jalan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Pendidikan, yang mana data yang telah didapatkan tersebut akan dijadikan sebagai bagian-bagian perumusan kebijakan Pendidikan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Analisi kebijakan ini sesungguhnya tidak hanya berperan dalam menganalisis data atau informasi Pendidikan saja, melainkan juga membahas segala hal yang masih berhubungan dengan kebijakan, contohnya mulai dari membuat kerangka permasalahan, menganalisisnya, mencari serta mengumpulkan sumber, mencari cara penyelesaian masalah hingga menyampaikan hasil tersebut kepada para

penentu hasil keputusan tentang permasalahan kebijakan tersebut. Penyusunan alternatif kebijakan dalam proses analisis kebijakannya dilakukan melalui berbagai macam tahapan, sehingga dibutuhkannya beberapa waktu dalam penyusunannya.

Apabila rumusan masalah telah tersusun dan mendapatkan banyak dukungan dari kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan akan segera mendapatkan persetujuan perubahan menjadi sebuah kebijakan, sehingga hal ini dapat segera diresmikan dan proses penghasilan sebuah alternatif kebijakan dapat berjalan dengan berkesinambungan dan rasional. Setelah itu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sudah meenjadi tanggung jawab pihak yang berwenang dalam mengatur kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis kebijakan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi Pendidikan di Indonesia, yang mana data-data yang sudah didapatkan tersebut akan disusun dan dijadikan alternatif kebijakan sehingga dapat dirumuskan dengan sifat politis untuk menyelesaikan permasalahan Pendidikan tersebut.

Disisi lain pada saat ini banyak masyarakat serta tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa Pendidikan harus dipisahkan dari politik, tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun kebijakan Pendidikan yang tidak terhubung dengan nilai-nilai politik. Sehingga pendapat tersebut bisa dikatakan sangat berlawanan dengan kehidupan yang ada. Contoh kebijakan tersebut yaitu nilai-nilai Pendidikan, tujuan Pendidikan, serta

anggaran Pendidikan. Ketiga kebijakan tersebut sesungguhnya adalah sebuah hasil kesepakatan dengan politik yang masih bersangkutan dengan Pendidikan nasional. Oleh karena itu peran Pendidikan dengan politik sanagtalah berkaitan.

Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai sebuah ilmu sosial yang dalam penerapannya secara tersusun dan bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok kebijakan Pendidikan. Sehingga dengan begitu para penyusun kebijakan dapat mengetahui permasalahan Pendidikan secara lebih detail dan dapat dengan tepat memilih cara apakah yang pas diterapkan dalam penyelesaian permasalahan Pendidikan tersebut. Hal tersebut dapat menunjukkan akan pentingnya analisis kebijakan dalam perwujudan Pendidikan yang pantas dan siap memasuki revolusi 4.0. Dengan diterapkannya hal tersebut dapat meminimalisir kelalaian wewenang olehpara aktor-aktor pemerintah, karena pemerintah masih harus mengkaji permasalahan dan mengkaji dampak yang akan diperoleh masyarakat apabila menerapkan suatu kebijaka baru. Dengan dilakukannya pengkajian tersebut dapat meberikan kebaikan bagi masyarakat maupun bagi pemerintah itu sendiri (Dr. Arwildayanto et al., 2018).

2. Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Terdapat karakteristik-karakteristik dalam analisis kebijakan pendidikan yang perlu kita ketahui yaitu, menganalisis kebijakan pendidikan yang merupakan suatu proses, jalan, ataupun kegiatan sintesis yang bersumber dari berbagai macam sumber informasi tentang pelayanan dalam

pendidikan. selain itu, juga merupakan suatu informasi yang secara langsung menjadi sumber utama dalam sebuah kajian analisis kebijakan dan sekaligus merupakan keluaran atau output. analisis kebijakan dapat berupa suatu nasehat petunjuk teknis standar operasional prosedural (SOP).

Karakteristik analisis kebijakan pendidikan berupa suatu bahan dasar, alur, urutan dan target untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan pendidikan kemudian pengguna dari analisis ini merupakan para pengambil keputusan serta kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan pendidikan ini harus Memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang.

Karakteristik analisis kebijakan pendidikan, antara lain

1. Suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan mencampurkan berbagai macam informasi yang datang, diantaranya hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pakar atau ahli. Sehingga akan dihasilkannya sebuah kesimpulan yang sesuai dengan permintaan dan tujuan penelitian tersebut.
2. Informasi menjadi sumber utama. Kajian analisis kebijakan pendidikan adalah suatu hasil dari dilaksanakannya suatu penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut merupakan keluaran dari tahapan pengolahan data penelitian

yang nantinya siap digunakan untuk menentukan keputusan dan desain kebijakan pendidikan.

3. Keluaran (output). Analisis kebijakan merupakan rekomendasi pilihan dan keputusan bisa dalam bentuk desain kebijakan. Keluaran kebijakan pendidikan yang lainnya dapat berupa sebuah pesan nasihat, petunjuk teknis SOP berupa urutan, alur, bahan, dan target pengambilan keputusan pasal pendidikan. Karena hal tersebut, analisis kebijakan pendidikan harus disampaikan atau dibentuk dalam bentuk laporan yang jelas, lengkap, singkat, dan padat.
4. Klien (pengguna). Analisis kebijakan pendidikan adalah orang atau kelompok yang pada dasarnya bertugas untuk menentukan atau mengambil keputusan terhadap kebijakan pendidikan yang telah ada. Biasanya penggunaanya bersifat khusus, dan berkaitan langsung dengan pengeluaran atau output analisis kebijakan pendidikan, contohnya saja seperti nasihat, arahan dan pedoman tentang kebijakan itu sendiri.
5. Orientasi analisis kebijakan terhadap klien (client oriented). Pertimbangan ini yang menjadi masalah dari karakteristik analisis kebijakan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan keputusan. Klien analisis kebijakan pendidikan yang tidak mengikuti orientasi nantinya tidak akan siap atau tidak berguna, artinya hal ini harus didasari oleh dan untuk pengguna. Analisis kebijakan pendidikan ini dapat dilaksanakan apabila terdapat sebuah permintaan yang pada saat itu benar-benar dibutuhkan oleh para klien.

3. Aktor dalam perumusan Kebijakan Pendidikan

Dalam kebijakan pendidikan ada aktor dalam merumuskan kebijakan tersebut. Kajian serta pembahasan yang nantinya akan dibahas oleh aktor kebijakan yaitu mengenai perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri, yang mana pembahasan tersebut kan menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Apalagi dengan adanya pemeran dibalik penentu isi kebijakan dengan diwarnai dinamika tahapan dan proses didalam perumusan kebijakan. Terdapat beberapa aktor kebijakan pendidikan yaitu, actor perorangan, kelompok, dan para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai kesatuan didalam sistem kebijakan pendidikan. Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam merumuskan kebijakan pendidikan para aktor perumus kebijakan tersebut terdiri dari para pemerintah yang didalamnya ada kementerian, Birokrat Karier dan Kantor Kepresidenan.

Kebijakan pendidikan ini di rumuskan oleh para staff birokrasi pemerintah dengan anggota legislatif dan juga komisi khusus kebijakan pendidikan. Memiliki peran dalam memberikan informasi untuk dapat mempengaruhi (Anderson, 2006 ; Winarno, 2014; Maskuri, 2017). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Howlett, Ramesh, & Perl (2009) yang mengkatogerikan aktor perumusan kebijakan itu akan termasuk ke dalam bidang pendidikan yang terdiri dari : Pertama, aparatur berupa eksekutif dan legislatif dengan keterkaitan urusan pendidikan tersebut; Kedua aparatur dalam tugasnya yaitu sebagai asisten birokrat yang menjadi kunci dasar dan *central figure* di

dalam proses kebijakan pendidikan; Ketiga, kelompok kepentingan yaitu pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi untuk menyalurkan gagasan kelompok terkait berbagai kepentingan, dalam hal ini terutama terkait dengan efektivitas kebijakan pendidikan atau untuk menyerang oposisi, jika dilihat dari kondisi pelayanan pendidikan, Keempat, organisasi penelitian akademisi dari perguruan tinggi dan kelompok ahli atau konsultan disetiap masing masing kebijakan, Kelima, media masa adalah jaringan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hubungan negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang sering terjadi terhadap jasa pendidikan diseluruh kegiatan didalam masyarakat, Keenam organisasi yang dengan cara profesional yaitu dengan cara menekuni suatu bidang keahlian sedang dijalannya, Ketujuh, orang yang mempunyai kompetensi dari isu yang di buat kebijakannya (Hasbullah, 2015).

Dalam berbagai macam aktor perumus dan pembentuk kebijakan ini, terkhusus kebijakan ini melibatkan pesertanya sedikit jika dibandingkan dalam tahapan penetapan agenda. Didalam tahapan seperti ini dibutuhkan lebih banyak yaitu kerja, untuk merumuskan alternatif kebijakan ini diambil di luar perhatian masyarakat umum (Sidney, 2007:79).

4. Metode Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam metode penelitian analisis kebijakan pendidikan, kebijakan evaluasi dapat digunakan secara luas. Metode penelitian sendiri memiliki beberapa

karakteristik yang berbeda, dan tidak ada satu metode pun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Namun, beberapa elemen inti telah ditemukan dalam jenis penelitian ini, yaitu: 1. Siapa subjek/sumber informasi penelitian dan bagaimana penentuannya? 2. Teks penelitian apa yang ingin Anda temukan dan alat apa yang akan Anda gunakan untuk mengumpulkan data penelitian? Apakah akan dikumpulkan? 3. Lalu bagaimana menyikapi, meringkas dan melaporkan hasil penelitian? Ketika peneliti merancang metode penelitian, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab. Bagaimana menentukan subjek, metode dan metode pengumpulan bahan, dan bagaimana menganalisis data sesuai dengan jenis penelitian rinci yang diperlukan. Berikut ini adalah contoh metode penelitian evaluasi kebijakan, yaitu metode penelitian kohesif/analisis file investigasi jarak jauh/meta-analisis dan evaluasi responsif.

Bagaimana menentukan subjek, metode dan alat proyek pengumpulan dan bagaimana menganalisis dan data sesuai dengan jenis penelitian dan detail yang diperlukan Berikut ini adalah contoh metode penelitian evaluasi strategi, yaitu metode penelitian terkompresi/analisis dokumen, evaluasi telemetri/meta-analisis, dan evaluasi respons. 1. Metode penelitian investigasi dapat digunakan untuk penelitian deskriptif, penelitian eksplanatori dan penelitian eksplorasi. Ciri khusus penelitian survei adalah walaupun hasil pengamatan penelitian berasal dari sampel (sebagian dari populasi), karena sampel/objek penelitian berlaku untuk semua populasi, maka harus mengikuti contoh konsep generalisasi untuk pilih

secara acak: 100 siswa dari seluruh sekolah 100 siswa dipilih secara acak dari sekolah untuk mempelajari opini survei statistik. Penelitian ini mengungkap pandangan siswa terhadap kebijakan sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru. Hasil penelitian 90% siswa setuju, yang berarti bahwa pendidikan profesional guru layak, meskipun pendapat siswa tidak diminta dalam proses pengumpulan informasi. Sampel yang besar digunakan untuk penyelidikan dan penelitian. Menurut Borg & Rile (1989), jumlah sampel penelitian deskriptif minimal 100 orang.

Alat pengumpulan teks sampel besar menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan/ Pernyataan) karena dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Kuesioner diisi oleh subjek sendiri. Baca konten oleh penerima informasi atau orang lain yang paling tahu topiknya. Sebaliknya, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner memiliki jawaban sederhana: pilih secara acak 100 siswa dari 100 siswa di sebuah universitas dan pelajari opini survei statistik. Dalam hal ini, dapat membantu melakukan penelitian dan mempromosikan pemrosesan informasi. Dalam penelitian ini, mahasiswa mengungkapkan pandangannya terhadap kebijakan sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru. Hasil penelitian 90% siswa setuju, yang berarti pendidikan profesi guru layak dilakukan, meskipun pendapat siswa tidak dicari dalam proses pengumpulan informasi. Sejumlah besar sampel digunakan untuk penyelidikan dan penelitian. Menurut Borg & Rile (1989), jumlah sampel penelitian deskriptif minimal 100 orang. Alat pengumpulan teks

sampel besar menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan/pernyataan) karena dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

Kuesioner diisi oleh subjek sendiri. Itu dibaca oleh penerima informasi atau diisi oleh orang lain yang paling tahu topiknya. Di sisi lain, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner memiliki jawaban yang sederhana sehingga responden dapat memeriksa kolom jawaban berikutnya.

2. Polling Telesurvey, pemungutan suara adalah cara untuk mengumpulkan opini publik dan mempromosikan materi pemungutan suara ke kelompok sasaran dalam waktu singkat. Penelitian survei telepon atau survei jarak jauh, termasuk jenis pemungutan suara. Ini disebut survei telepon, yaitu metode pemungutan suara melalui panggilan telepon, pesan teks, atau web tray, sehingga tidak ada interaksi tatap muka antara peneliti dan subjek. Pemungutan suara dilakukan melalui telepon.

Orang biasanya memilih cara pemungutan suara sendiri, karena sebagai sampel, seorang responden dapat memilih lebih dari satu suara. Peristiwa ini disebut "gosip" ("jajak pendapat dari audiens yang dipilih"). Metode polling telepon juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Eriyanto (1999), kelebihan telepon antara lain: (1) Akses cepat ke nomor. (2) Pendapat responden tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. (3) Waktu wawancara fleksibel dan terkendali, dimulai dari wawancara. Kerugiannya adalah (1). Sampel sangat terbatas. (2) Responden dapat menolak atau menghentikan wawancara di tengah jalan. (3) Wawancara kurang mendapatkan

informasi melalui telepon. (4) Terkadang jari tidak ramah saat melakukan panggilan, dan terkadang tidak dapat terhubung, Anda harus mengganti nomor telepon untuk menyalurkan kembali.

3. Analisis data sekunder Metode analisis data sekunder disebut dengan statistik eksisting. Sumber data sekunder berasal dari database institusional, dokumen, data statistik atau laporan penelitian. Penelitian analisis data sekunder. Peneliti menyusun ulang atau menggabungkan informasi ke dalam metode penelitian eksplanatori dan deskriptif yang baru.

4. Analisis Meta Meta analisis penelitian meliputi analisis data sekunder dan analisis data sekunder adalah data yang mendukung hasil penelitian. Penelitian meta-analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara merangkum, mengkaji, dan menganalisis data penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya (Neil, 2006). Menggunakan meta-analisis, banyak pertanyaan dapat dicari, tetapi mereka harus tersedia secara logis dan data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Penelitian meta-analisis dimulai dengan merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian, dan kemudian melacak hasil penelitian terbaru yang relevan.

Para peneliti sebelumnya telah memperoleh data penelitian, dan peneliti selanjutnya akan menganalisis data lebih lanjut dan melaporkan kembali ke format penelitian yang baru. Oleh karena itu, laporan penelitian bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang telah selesai karena penelitian tersebut menggunakan data-data penting yang diperoleh dari hasil penelitian terbaru untuk

dianalisis. Anda akan diberi tahu saat mendapatkan sumber data dan di mana Anda dapat menemukan sumber data. Nama peneliti disebut juga dengan etika ilmiah. Dalam meta-analisis, analisis data dilaporkan dengan meringkas dan mengekstraksi ringkasan hasil penelitian. Kemudian laporkan data tersebut secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif.

5. Permasalahan Kebijakan Pendidikan Indonesia

Dalam Permasalahan kebijakan pendidikan Indonesia para analis diharapkan dapat memahami serta mengaplikasikan seluruh teknis penelitian kebijakan pendidikan. Namun selain pemahaman teknis penelitian tersebut para analis juga diharapkan dapat memahami permasalahan-permasalahan pendidikan yang masih bersangkutan dengan kondisi saat ini. Apabila permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut terus dibiarkan dapat membawa efek negatif dalam kinerja pendidikan dimasa mendatang dan para tokoh pendidikanpun akan kesulitan mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Sehingga permasalahan tersebut haruslah dimenej dan dianalisis dengan baik dalam sektor internal maupun eksternal.

Permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering terjadi pada pendidikan Indonesia adalah pendidikan gratis yang belum tersebar secara menyeluruh dan kurang tepat sasaran, perbedaan pendapat tentang ujian nasional, kompetensi guru yang belum terlaksana secara optimal, program sertifikasi guru yang belum berjalan secara maksimal, peningkatan mutu yang belum berjalan baik, biaya pendidikan yang terlalu mahal dan

lain-lain. Namun permasalahan-permasalahan tersebut dalam penyelesaiannya ada yang membutuhkan kebijakan, taktis, strategis, maupun kebijakan operasional saja. Kebijakan taktis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek. Kebijakan Strategis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka panjang serta keputusan tersebut tidak dapat diubah. Sedangkan kebijakan operasional adalah kebijakan yang hasil keputusannya relatif dapat diubah sesuai dengan situasi yang ada.

Dalam penyusunan analisis kebijakan pendidikan haruslah disusun secara cermat, sesuai pedoman serta tidak merugikan pihak tertentu, hal ini dikarenakan adanya berbagai variasi pandangan terhadap permasalahan pendidikan tersebut. Analisis kebijakan biasa disebut dengan strategi pemecahan masalah pendidikan, namun sesungguhnya analisis kebijakan pendidikan tersebut adalah sebuah strategi yang dalam pengerjaannya tidak dapat secara langsung menyelesaikan permasalahan. Maksudnya yaitu dalam prosesnya analisis kebijakan pendidikan akan terlebih dahulu memahami serta mempelajari masalah yang ada. Langkah-langkah pendekatan dalam menangani permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Analisis akan mempelajari data sekunder terlebih dahulu, 2) lalu analisis akan melakukan wawancara dan melakukan observasi secara langsung. Kriteria dalam menentukan penstrukturan permasalahan sangat berbeda dengan kriteria menentukan keberhasilan penyelesaian permasalahan. Syarat-syarat penstrukturan permasalahan

dapat dikatakan baik jika memenuhi : 1) hasil analisis yang didapatkan benar-benar fresh, 2) proses dalam analisis yang dilakukan tidak secara tradisional, 3) Dalam pelaksanaannya harus disertai dengan semangat yang tinggi dan ketekunan, 4) analisis menilai bahwa hasil yang di dapatkan bernilai tinggi, 5) permasalahan yang dianalisis mudah dipahami.

Setelah melewati tahap penstrukturan masalah, analisis akan menyusun permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai rumusan masalah. Setelah rumusan masalah tersusun maka para analisis akan mulai menyusun kebijakan sesuai dengan tahapan analisis kebijakan yang berpatokan pada permasalahan kebijakan yang terjadi. Tahap selanjutnya setelah penyusunan kebijakan yaitu pemantauan dalam proses kebijakan, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi segala kinerja kebijakan yang sedang berlangsung. Setelah mendapatkan hasil kebijakan maka hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kebijakan pendidikan masa yang akan datang. Sehingga para tokoh-tokoh pendidikan dapat mempersiapkan segala perlengkapan serta mental dalam menghadapi masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sekelompok proses perumusan permasalahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi yang sah yang akan menghasilkan kebijakan bagi dunia pendidikan Indonesia (MEGAWANTI, 2012).

D. KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah ilmu sosial yang dalam penerapannya secara tersusun dan bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok kebijakan Pendidikan. Sehingga dengan begitu para penyusun kebijakan dapat mengetahui permasalahan Pendidikan secara lebih detail dan dapat dengan tepat memilih cara apakah yang pas diterapkan dalam penyelesaian permasalahan Pendidikan tersebut.

Karakteristik analisis kebijakan Pendidikan, antara lain: 1) proses kegiatan sintesis dari berbagai sumber informasi mengenai layanan pendidikan, 2) Informasi menjadi sumber utama, 3) Keluaran (output), 4) Klien (Pengguna), 5) Orientasi analisis kebijakan terhadap klien (client oriented). Aktor dalam analisis kebijakan Pendidikan diantaranya yaitu : 1) Aparatur eksekutif dan legislatif, 2) Kelompok kepentingan, 3) Organisasi akademis, 4) Media massa, 5) Orang yang memiliki kompetensi kebijakan. Metode penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis kebijakan Pendidikan yaitu : 1) Survei Metode penelitian digunakan dalam penelitian deskriptif, 2) Poling Telesurvei, 3) Analisis Data Sekunder, 4) Meta Analisis Permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering terjadi pada pendidikan Indonesia adalah pendidikan gratis yang belum tersebar secara menyeluruh dan kurang tepat sasaran, perbedaan pendapat tentang ujian nasional, dll. Tahapan dalam menyusun analisis kebijakan yang pertama yaitu tahap penstrukturan masalah, kedua tahap penyusunan kebijakan, ketiga tahap pemantauan dalam proses kebijakan.

Setelah mendapatkan hasil kebijakan maka hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kebijakan Pendidikan di masa yang akan datang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making*, Sixth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.

Hasbullah. (2015), *Otonomi pendidikan: kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafinho Persada

MEGAWANTI, P. (2012). Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia. *Formatif*, 2(3), 234831. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i3.105>

Dr. Arwildayanto, M. P., Dr. Arifin Suling, M. P., & Dr. Warni Tune Sumar, S.Pd., M. P. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).

Masdin. (2008). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi. *Shautut Tarbiyah*, September, 83–101.

Mulyatiningsih, E., & A. (2005). *METODE PENELITIAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN Oleh*. 4(1), 15.

Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/>

1159

Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, April, 15.

Howlett, M., Ramesh, M., & perl, A. (2009). *Studying public policy: policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford: Oxford University Press.

Lester, James P & Stewart, Joseph JR. (2010). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. USA, Wadsworth/Thomson Learning.